



**LURAH SRIMARTANI**  
**KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN LURAH SRIMARTANI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN**  
**DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
LURAH SRIMARTANI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa/Kalurahan wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, salah satunya untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sehingga perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2018 – 2024 (Lembaran Desa Srimartani Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Lurah Srimartani Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Srimartani Tahun 2023 Nomor 4).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN, DAN

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Piyungan.
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Srimartani.
6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang

dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.

12. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (2) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT-Desa paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

#### Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrim sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

BAB III  
PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA DAN  
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan;
- (2) Musyawarah Kalurahan menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH);
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- (3) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan;
- (4) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga;
  - b. Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
  - c. Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - d. Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2);
- (6) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (3), (4) dan (5) dengan keputusan lurah;
- (7) Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan lurah.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;

- c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
  - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir di dalam Peraturan Lurah;
  - (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b apabila dikarenakan meninggal dunia maka digantikan oleh ahli waris dalam satu Kartu Keluarga;
  - (4) Apabila keluarga penerima manfaat meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak memiliki ahli waris dalam satu Kartu Keluarga, maka dapat digantikan dengan keluarga penerima manfaat yang tercantum dalam daftar cadangan keluarga penerima manfaat.
  - (5) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
  - (6) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk atau mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
  - (7) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak BLT-Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
  - (8) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2024 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2024;
  - (9) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di kantor kalurahan.

## BAB IV TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

### Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat;
- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2024 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima;
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (5) Penyaluran BLT-Desa dilakukan untuk setiap bulan.
- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kalurahan.
- (7) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaluran.

## BAB V PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

### Pasal 7

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.



#### Pasal 8

- (1) Pendataan dilakukan oleh Dukuh dengan melakukan musyawarah dukuh;
- (2) Musyawarah dukuh paling sedikit melibatkan:
  - a. Ketua RT;
  - b. Perwakilan Perempuan;
  - c. Tokoh Masyarakat Lainnya.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan pendataan.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana ayat (1) diisikan dalam form pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana lampiran 1 dari Peraturan Lurah ini.

#### Pasal 9

- (1) Verifikasi Lapangan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri dari:
  - a. Ketua dijabat Carik;
  - b. Sekretaris dijabat Kepala Urusan Pangripta;
  - c. Anggota tim verifikasi berasal dari Jagabaya, staf kalurahan, dukuh, pendamping kalurahan, dengan jumlah ganjil.
- (2) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim verifikasi.

#### Pasal 10

- (1) Tim verifikasi melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh calon keluarga penerima manfaat hasil pendataan;
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengkonfirmasi kesesuaian data pendukung sebagaimana hasil pendataan dengan kondisi nyata calon keluarga penerima manfaat;
- (3) Tim verifikasi menyerahkan hasil verifikasi lapangan kepada Lurah;
- (4) Lurah dapat meminta kepada Tim verifikasi untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dianggap kurang sesuai dan atau meragukan;
- (5) Lurah menyampaikan hasil verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa untuk dilakukan validasi dan penetapan melalui musyawarah kalurahan;
- (6) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan selambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari Lurah.

#### Pasal 11

- (1) Musyawarah kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah;
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada dukuh sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Dalam hal validasi menunjukkan ketidaksesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, Bamuskal meminta tim verifikasi untuk menambahkan data baru sepanjang masih terdapat calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang berlaku.
- (4) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat di tuangkan di dalam berita acara musyawarah kalurahan yang dilampiri dengan data *by name by address* calon keluarga penerima manfaat;

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 12

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Srimartani

Pada tanggal : 17 Januari 2024

LURAH SRIMARTANI

ttd

MULYANA

Diundangkan di : Srimartani

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Carik Srimartani  
ttd  
EKO HERRI PURWANTO

BERITA KALURAHAN SRIMARTANI KAPANEWON PIYUNGAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 1

